

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

GISKA NOORIZKIE
NIM. C2C009111

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Giska Noorizkie
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009111
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**
Dosen Pembimbing : Hj. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 3 Juli 2013
Dosen pembimbing

(Hj. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt)
NIP 19730803 200012 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Giska Noorizkie
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009111
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 11 Juli 2013

Tim Penguji :

1. Hj. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt (... ..)
2. Fuad, SET, M.Si., Ph.D (... ..)
3. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt (... ..)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Giska Noorizkie, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 Juli 2013

Pembuat pernyataan,

Giska Noorizkie

NIM : C2C009111

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

Al-Quran surat Ar-Ra'd : 11

“...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

Man Jadda Wa Jada, Man Shabara Zhafira
Siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil, siapa yang sabar maka ia akan beruntung

“There is no stop when God says go”

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan:

untuk kedua orang tuaku,

untuk kakak dan adik-adikku,

untuk keluarga besarku,

untuk dosen, teman-teman, serta almamaterku.

Terima kasih atas semua doa, semangat, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of corporate governance mechanisms to the company's financial performance. The dependent variable used in this study is company's financial performance which proxied by return on asset (ROA) and independent variable is corporate governance mechanism which proxies by size of the board of commissioners, size of the board of independent commissioners, size of the audit committee, size of the board of directors, managerial ownership, and institutional ownership.

This study used secondary data from annual reports of manufacturing companies which listed on Bursa Efek Indonesia in 2010-2011. Sample were 110 manufacturing companies. This study used purposive sampling method and used multiple linear regression as the analysis instrument. Before being conducted the regression test, it was examined by using the classical assumption tests.

The results of this study indicate that the size of the board of commissioners, size of the board of independent commissioners, size of the audit committee, and managerial ownership did not have significant influence to the company's financial performance. The size of the board of directors and institutional ownership have significant influence to the company's financial performance.

Keywords: corporate governance mechanisms, size of the board of commissioners, size of the board of independent commissioners, size of the audit committee, size of the board of directors, managerial ownership, and institutional ownership, company's financial performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan oleh *Return on Asset* (ROA) dan variabel independennya adalah mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Sampelnya berjumlah 110 perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci : mekanisme *corporate governance*, ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kinerja keuangan perusahaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui lembar halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta. Papi (H. Gusmansyah Surya, S.E., MBA), Mami (Hj. Syarifah Elvi Hanim) yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa yang tak pernah putus serta memberikan arahan, nasihat, dan kebebasan dalam menentukan jalan hidup. Semoga penulis selalu dapat memberikan yang terbaik dan menjadi anak yang sholehah dan berbakti.
2. Kakak tersayang, Livya Nurul Azqani dan juga kedua adikku tersayang, Balqiz Nurkhalida dan Indah Nurul Fajar, yang selalu menjadi pengingat dan penyemangat agar bisa menjadi adik dan juga menjadi kakak yang baik. Makasih untuk semua doa dan semangatnya, *girls*.
3. Keluarga besar penulis. Almarhumah Mbah Rustiyana Asdidah, Mama Minje, makasih buat semua kasih sayangnya.

4. Ibu Hj. Siti Mutmainah, SE., MSi., Akt., selaku dosen pembimbing skripsi untuk ilmu pengetahuan yang ditularkan, perhatian, masukan, dan pengorbanan waktu dalam memberikan bimbingan dan koreksi kepada penulis. Terimakasih banyak, Ibu Peri.
5. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt., selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Bapak Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam menjalani masa perkuliahan.
8. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh teman-teman Akuntansi 2009 Reguler I Universitas Diponegoro Semarang, terima kasih telah memberikan waktu kurang lebih 4 tahun yang sangat bermakna pada hidup penulis.
10. Untuk teman-temanku tercinta Desy, Konny, Agni, Mita, Ayu, Revani, Doni, Rohman, Arta, Silvi, Inna, Ditia, Tito Gusti, Tito Al(ay)bi, Rendy Gendut, Ichan, Adit, Toyek, Om, Mayco, Dilla, Putu, Lovink, Ridho, Nelly, Ocin. Terimakasih atas pertemanan dan keluarganya.
11. Luthfi Hartanto, yang mengajarkan banyak hal kepada penulis. Kebersamaan lebih dari 2 tahun terakhir penulis berada di Universitas Diponegoro memberikan banyak kesan dan kenangan. Terimakasih banyak atas doa,

dukungan, kasih sayang, perhatian, pengertian, dan semangat yang telah diberikan. *You are my Pillow*.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 3 Juli 2013
Penulis

Giska Noorizkie

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	16
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	16
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.2.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.2.2 Asas <i>Corporate Governance</i>	21
2.1.2.3 Tujuan <i>Corporate Governance</i>	23
2.1.2.4 Manfaat <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.3 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	25
2.1.3.1 Ukuran Dewan Direksi.....	26

2.1.3.2	Ukuran Komisaris Independen.....	28
2.1.3.3	Ukuran Komite Audit.....	29
2.1.3.4	Ukuran Dewan Direksi.....	31
2.1.3.5	Kepemilikan Manajerial.....	23
2.1.3.6	Kepemilikan Institusional	34
2.1.4	Kinerja Keuangan Perusahaan	35
2.1.5	Penelitian Terdahulu.....	40
2.2	Kerangka Pemikiran	50
2.3	Perumusan Hipotesis	51
2.3.1	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	52
2.3.2	Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	54
2.3.3	Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	56
2.3.4	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	58
2.3.5	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	59
2.3.6	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	61
BAB III METODE PENELITIAN.....		64
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	64
3.1.1	Variabel Dependen	64
3.1.2	Variabel Independen.....	65
3.2	Populasi dan Sampel.....	67
3.3	Jenis dan Sumber Data	68
3.4	Metode Pengumpulan Data	68
3.5	Metode Analisis	69
3.5.1	Statistik Deskriptif	69
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	69

3.5.2.1 Uji Normalitas.....	70
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	71
3.5.2.3 Uji Multikolinearitas	71
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	72
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	72
3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	73
3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	74
3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	76
4.2 Analisis Data	77
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	77
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	81
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	81
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	83
4.2.2.3 Uji Multikolinearitas	84
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	85
4.2.3 Pengujian Hipotesis	86
4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	87
4.2.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	87
4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	89
4.3 Pembahasan	90
4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	90
4.3.2 Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	90
4.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	91
4.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	92

4.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	93
4.3.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	94
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Simpulan	96
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	98
5.3 Saran	98
Daftar Pustaka	100
Lampiran-Lampiran	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 4.1 Ringkasan Pemilihan Sampel	76
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	78
Tabel 4.3 Frekuensi Distribusi Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional	79
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov Smirnov	83
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser	84
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	85
Tabel 4.7 Hasil Uji Run Test.....	86
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	87
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	88
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	82
Gambar 4.2 Normal P-Plot.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Data Mentah Penelitian.....	104
LAMPIRAN B Hasil Statistik Deskriptif	109
LAMPIRAN C Hasil Uji Normalitas	110
LAMPIRAN D Hasil Uji Heterokedastisitas	112
LAMPIRAN E Hasil Uji Multikolonieritas	113
LAMPIRAN F Hasil Uji Autokorelasi.....	114
LAMPIRAN G Hasil Uji Statistik F	115
LAMPIRAN H Hasil Uji Statistik t (Partial)	116
LAMPIRAN I (Simultan) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	117

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan juga diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu bentuk entitas tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran dari suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholder and shareholder*). Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui kinerja perusahaan tersebut (Bukhori, 2012).

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang diukur dengan

standar. Pratiwi (2012) menyatakan kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Dalam mewujudkan visi dan misi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam periode waktu tertentu yaitu dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik gambaran perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau *variable* untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Selain itu juga dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan, seperti *Market Share Growth*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, *ROI growth*, *Return On Equity (ROE)*, *Price Earning Ratio*, dan rasio-rasio keuangan lainnya.

Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya untuk memaksimalkan kinerja dalam mencapai target perusahaan dan juga untuk meningkatkan *return* bagi pemegang saham. Salah satu cara agar dapat mencapai hal tersebut, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) yang efektif dalam jangka panjang pada perusahaan sehingga dapat membantu mengendalikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan sesuai dengan harapan pemegang saham. Mekanisme *corporate governance* yang baik memungkinkan perusahaan agar dapat beroperasi lebih efektif dan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Selain memiliki kinerja keuangan yang baik perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola atau *corporate governance* yang baik.

Perusahaan *go public* membutuhkan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi keuangan kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, perusahaan publik harus memandang *good corporate governance* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Sekaredi, 2011).

Corporate governance juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, mengingat sering terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik

perusahaan dalam mengambil keputusan. Konflik *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada *agency theory* yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Diharapkan dengan adanya *corporate governance* perbedaan kepentingan antara pemilik modal dengan manajemen sebagai pengelola dana dapat diminimalisir sehingga selain memiliki kinerja keuangan yang baik, perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola yang baik.

Konsep *corporate governance* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980, dikarenakan banyak pemegang saham yang mulai melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh manajemen. Pemegang saham memperlmasalahkan kurangnya akuntabilitas, kompensasi manajemen yang berlebihan serta dewan direksi yang tidak berjalan secara efektif. Masalah tersebut timbul karena kinerja manajemen identik dengan kinerja perusahaan yang dianggap tidak memuaskan bagi pemegang saham (Sugiarsono, 2008 dalam Pribadi 2008).

Permasalahan *Corporate Governance* mencuat menjadi perhatian dunia setelah terungkapnya skandal dan bentuk korupsi korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron bergerak dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas, dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik *Big Five* saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen (Sekaredi, 2011). Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan melakukan *mark-up* laba perusahaan dan menyembunyikan

sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur Andersen ditutup secara global (Bukhori, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa auditor telah lalai melakukan tugasnya dengan baik.

Dari kasus pelanggaran tersebut nampak bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) yang seharusnya menjalankan tugas dari pemegang saham dengan pemegang saham (*principal*) itu sendiri. *Corporate governance* merupakan solusi yang ditawarkan oleh *agency theory* untuk membantu hubungan *agent* dan *principal*, dan diharapkan dengan penerapannya dapat memberikan kepercayaan terhadap *agent* (manajemen) dalam mengelola kekayaan *principal* (pemegang saham atau investor), dan *principal* menjadi lebih yakin bahwa *agent* tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan *agent*.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keagenan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Ujiyantho (2006) mengatakan, secara umum, mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam peningkatan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Mekanisme *corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Sari, 2009 dalam Rahadiani, 2011). Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini memilih mekanisme tersebut karena dianggap memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance* yang mana keenam mekanisme tersebut memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol

perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir masalah keagenan yang mungkin akan terjadi akibat perbedaan kepentingan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999 dalam Sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen serta semakin efektif memaksimalkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011), Sibarani (2010), dan Sari (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Fama dan Jensen (1983 dalam Nur, 2007) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen atau eksternal dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan

terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost* dan meningkatkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) dan Rini (2012) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Achchuthan dan Kajanathan (2012), Sam'ani (2008), dan Sibarani (2010) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data finansial dan kontrol internal, eksistensi komite audit terletak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Eksistensi dari komite audit dengan proporsi yang tinggi pada proporsi direktur independen akan mereduksi biaya agensi dan meningkatkan kontrol internal yang akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008), Sekaredi (2011) dan Rini (2012) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2010) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen perusahaan dan memonitor perusahaan untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012), Sam'ani (2008), dan

Sekaredi (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Manajemen tidak dapat berpikir seperti *stakeholders* apabila mereka tidak menjadi *stakeholder*. Manajemen seharusnya memiliki resiko keuangan sebagaimana resiko keuangan yang ditanggung *stakeholders* sehingga akan bertindak demi kepentingan terbaik *stakeholders*, sehingga kepemilikan saham oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pemenuhan kepentingan *stakeholder* yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan instiusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen (Iskandar, 2011 dalam Adjani, 2013). Short dan Kesay (1999), Morek et al, (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Januarti (2008) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada *monitoring* atas keputusan manajemen.

Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Setiawan, 2011 dalam Adjani, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008), Sekaredi (2011), dan Sibarani (2010) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Rini (2012) tidak menunjukkan hasil yang serupa.

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan memunculkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa peneliti telah menguji hubungan diantara kedua variabel tersebut. Achchuthan dan Kajanathan (2012) meneliti pengaruh yang signifikan antara praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) menunjukkan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap praktik *corporate governance*.

Berbeda dengan Achchuthan dan Kajanathan (2012), Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Tobin's Q digunakan sebagai ukuran penilaian pasar dan *Return On Asset (ROA)* sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan. Penelitian Klapper and Love (2002) didukung oleh penelitian Sam'ani (2008) yang menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia terutama perusahaan perbankan sudah

mulai menerapkan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan para *principal*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) tentang praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo pada tahun 2007-2011. Dalam penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sedangkan variabel independennya adalah praktik *corporate governance* yang diprosikan oleh struktur kepemimpinan dewan, dewan komite, rapat direksi, dan proporsi komisaris independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) adalah variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu mekanisme *corporate governance* yang diprosikan oleh ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah laporan tahunan pada tahun 2010-2011. Laporan tahunan didapat dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini dapat memberikan gambaran seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan melihat tingkat *Return On*

Asset (ROA) maka dapat diukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit perusahaan, yang juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan para manajer untuk membuat keputusan. Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur disebabkan karena peneliti ingin menguji tata kelola perusahaan (*corporate governance*) manufaktur yang baik berdasarkan ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sehingga dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut dapat memperkuat atau melemahkan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu terjadi *research gap* (kesenjangan penelitian) dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menghubungkan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)
6. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan (*Return On Asset*)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di pasar modal.

3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (i) teori agensi yang menjadi landasan teori penelitian ini dan konsep-konsep mengenai *corporate governance* meliputi definisi, asas, tujuan, manfaat, dan konsep mengenai karakteristik *corporate governance*, serta penjelasan konsep mengenai kinerja perusahaan, (ii) uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (iii) pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian penelitian terdahulu yang dirangkai dengan kerangka pemikiran.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi ini dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori agensi merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan *principal* dengan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Teori agensi lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan *principal* dan *agent*. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang berisi gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban *principal* dan *agen*, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan dan meminimalisir biaya keagenan (*agency cost*). *Principal* mendelegasikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer

(*agent*) sesuai dengan kontrak kerja. Tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab *agent* dan *principal* diatur dalam kontrak kerja yang didepakati bersama.

Pihak *principal* adalah pemegang saham atau investor sebagai pemilik perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Investor yang merupakan aspek dari kepemilikan perusahaan mendelegasikan kewenangan kepada agen manajer untuk mengelola kekayaannya. Harapan investor dengan adanya pendelegasian wewenang pengelolaan kekayaan adalah bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor (Anggitasari, 2012). Dengan demikian, teori agensi adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investor dan pengendalian perusahaan oleh manajemen.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. Konflik kepentingan antara pemilik modal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu masalah keagenan (*agency conflict*). *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik modal (*principal*) menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer termasuk memaksimalkan kompensasinya, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik modal (*principal*) dengan manajer (*agent*). Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut.

Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada *agent* untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap *agent* oleh para *principal*, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh *principal* tidak memuaskan, *principal* dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat (Bukhori, 2012).

Hubungan antara *principal* dan *agent* ini merupakan hal mendasar bagi praktik penerapan *corporate governance*. *Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan

atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dalam artian sempit, teori keagenan sebagai dasar penerapan *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk meminimumkan terjadinya masalah keagenan dan menurunkan biaya keagenan serta sebagai rujukan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Secara luas, *corporate governance* diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima tingkat pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan.

2.1.2 Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi Corporate Governance

Terdapat banyak definisi tentang *corporate governance* (tata kelola perusahaan). *Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Menurut Griffin (2002) dalam Susiana dan Herawaty (2007) pengertian *corporate governance* adalah “*The roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making*”. Jadi menurut Griffin *corporate*

governance merupakan suatu sistem yang mengatur pemegang saham, direktur maupun manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Ini berarti bahwa *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam (Boediono, 2005).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on

corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Jadi menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders non-pemegang saham*.

2.1.2.2 Asas Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (KNKG, 2006). Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki asas sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,

tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Idependency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan (IICG, 2013).

2.1.2.3 Tujuan Corporate Governance

Tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut KNKG (2006) dalam Anggitasari (2012), maksud dan tujuan *good corporate governance* Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.

- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.1.2.4 Manfaat Corporate Governance

Priambodo dan Suprayitno (2007) dalam Purwaningtyas (2011) menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah (Daniri, 2005).
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang lama (Daniri, 2005).

3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham (Sutojo dan Aldridge, 2005).
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005).

Namun manfaat yang optimal dari *good corporate governance* ini tidak sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha, jenis risiko, struktur permodalan dan manajemennya (Purwaningtyas 2011).

2.1.3 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-

pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, variabel mekanisme *corporate governance* yang ingin dikaji lebih dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang baik (*good corporate governance*) yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian (Antonia, 2008 dalam Laila, 2011).

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Pasal 108 UU PT menjelaskan bahwa dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perusahaan Terbuka wajib

mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kinerja perusahaan.

Pasal 116 UU PT lebih lanjut menjelaskan bahwa dewan komisaris wajib untuk:

- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan yang telah dilakukan kepada RUPS

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvisky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional

untuk mewakili pemegang saham. Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham perusahaan agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

2.1.3.2 Ukuran Komisaris Independen

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer (Darwis, 2009 dalam Laila, 2011). Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui

aktivitas evaluasi dan keputusan strategik. Aktivitas evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, potensi *mismanagement* yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimumkan. Berkurangnya *mismanagement* menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan akan tercapai. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada jajaran dewan komisaris. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa Perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan.

2.1.3.3 Ukuran Komite Audit

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.I.5. Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris. Menurut Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009) komite Audit dapat

mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Komite audit juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada disuatu perusahaan. Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.1.3.4 Ukuran Dewan Direksi

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia pengaturan terhadap direksi terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

- a. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan; serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
- c. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan keinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
- e. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

S. Beiner, *et al* (2003) dalam Purwaningtyas (2011) menegaskan bahwa dewan direksi dapat membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan publik. Beiner S., *et al* (2003) juga menegaskan bahwa dewan direksi merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan pemegang saham.

Ketentuan jumlah minimal dewan direksi yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah 2 orang.

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik.

2.1.3.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Kepemilikan saham manajerial dapat menyatukan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Melalui kepemilikan saham manajerial, manajer diharapkan lebih bertindak untuk kepentingan pemegang saham setelah memiliki porsi saham tertentu di dalam perusahaan karena manajer memiliki resiko keuangan yang sama dengan *stakeholders* sehingga menuntut manajer memiliki kinerja lebih baik.

Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Contoh strategi yang diambil adalah integrasi terhadap perusahaan lain dengan mempertimbangkan peningkatan penjualan jangka panjang. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar

dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Menurut Anggraini (2006) semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Kepemilikan manajerial diukur dengan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajer terhadap jumlah saham beredar (Sanda *et al.* 2005).

2.1.3.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sekaredi, 2011). Mayoritas institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan (Fauzi, 2004 dalam Laila, 2011). Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Crutchley dan Hansen (1989), Bathala *et al.* (1994) dalam Faisal (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang diukur dengan standar. Pratiwi (2012) menyatakan kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Dalam mewujudkan visi dan misi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam periode waktu tertentu yaitu dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik gambaran perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat membuahkan hasil dan tindakan yang diharapkan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan

perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau *variable* untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Selain itu juga dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu.

Kinerja keuangan sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama periode tertentu. Terdapat lima jenis ratio keuangan menurut James dan John (2005) dalam Rini (2012), yaitu :

1. Ratio Likuiditas

Ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ratio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Terdapat dua jenis pengukuran rasio likuiditas, yaitu :

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi nilai rasio lancar maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihan.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Merupakan ukuran yang lebih konservatif dari pengukuran likuiditas. Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio ini berfungsi sebagai pelengkap rasio lancar (*current ratio*) dalam menganalisis likuiditas

2. Rasio *Leverage* Keuangan

Ratio *leverage* ini merupakan ratio utang, digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang untuk dipinjam. Terdapat dua jenis rasio *leverage*, yaitu :

a. *Debt-to-equity*

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang perusahaan termasuk kewajiban jangka pendeknya dengan ekuitas pemegang saham.

b. *Debt-to-total asset*

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total hutang perusahaan dengan total aktivasnya.

3. Rasio *Coverage*

Ratio ini di desain untuk menghubungkan berbagai beban keuangan perusahaan dengan kemampuannya untuk membayarnya. Perhitungan rasio ini adalah membandingkan laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*) dengan beban bunganya. Secara umum, semakin tinggi tingkat rasionya, maka semakin besar juga kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunga tanpa kesulitan. Rasio ini juga menekankan pada kemampuan perusahaan untuk mengambil utang baru.

4. Ratio Aktivitas

Disebut juga *ratio* efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivitya. Beberapa aspek dari analisis aktivitas sangat dekat hubungannya dengan analisis likuiditas.

Rasio aktivitas terdiri dari :

a. Rasio Perputaran Piutang

Rasio ini memberikan pandangan mengenaikualitas piutang perusahaan dan seberapa berhasilnya perusahaan dalam penagihannya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi piutang ke dalam penjualan kredit tahunan.

b. Rasio Perputaran Persediaan

Rasio ini digunakan untuk membantu menentukan seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola persediaan. Rasio ini

dihitung dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan.

c. Rasio Perputaran Total Aktiva

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi relative total aktiva untuk menghasilkan penjualan.

5. Ratio Profitabilitas

Terdiri dari dua jenis rasio:

a. Profitabilitas kaitannya dengan penjualan, terdiri dari:

1.) Ratio margin laba bersih

Merupakan ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan.

2.) Rasio margin laba kotor

Rasio ini menginformasikan laba dari perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, setelah menguranginya dengan biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Rasio ini adalah pengukur efisiensi operasi perusahaan, serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya.

b. Profitabilitas kaitannya dengan investasi, terdiri dari:

1.) Tingkat pengembalian atas investasi (*Return on Investment-ROI*)
atau tingkat pengembalian atas aktiva (*Return on Asset-ROA*)

2.) Tingkat pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity- ROE*).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Klapper dan Love (2002). Dalam penelitian tersebut ditemukan bukti bahwa adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) dan Tobin's Q.

Ana (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *Economic Value Added*. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah mekanisme monitoring organisasi (rangkap kepemimpinan dewan direksi dan dewan komisaris, serta proporsi komisaris independen), mekanisme insentif manajemen (kompensasi manajemen), dan mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan institusional).

Pranata (2007) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan menerapkan *good corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap *Return on Equity* (ROE), Tobin's Q, dan Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap ROE, Tobin's Q, dan NPM.

Achchuthan dan Kajanathan (2012) melakukan penelitian tentang praktik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo pada tahun 2007-2011. Dalam penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) variabel dependennya adalah

kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sedangkan variabel independennya adalah praktik *corporate governance* yang diproksikan oleh struktur kepemimpinan dewan, dewan komite, rapat direksi, dan proporsi komisaris independen. Hasil penelitian Achchuthan dan Kajanathan (2012) menunjukkan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap praktik *corporate governance*.

Hidayah (2007) melakukan penelitian mengenai *corporate governance*, pengungkapan informasi, dan kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya pengungkapan informasi. Penelitian ini memasukkan pengungkapan informasi sebagai variabel *intervening* yang memediasi pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung.

Sam'ani (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh elemen-elemen dalam penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel adalah perusahaan perbankan selama periode 2004-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan para *principal*.

Setiyarini dan Purwanti (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan, dan pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Manajemen laba diukur dengan menggunakan akrual diskresioner dari model Jones yang dimodifikasi dan kinerja perusahaan dengan Tobin Q. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2006-2008 dengan jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh.

Prayudhanto (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel, yaitu: *corporate governance* (sebagai variabel independen), kinerja perusahaan (sebagai variabel dependen), dan ukuran perusahaan (sebagai variabel kontrol). Untuk variabel independen digunakan *proxy*: ukuran dewan komisaris,

proporsi komisaris independen, dan *leverage*. Untuk variabel dependen digunakan *proxy*: ROA dan Tobin's Q. Sedangkan untuk variabel kontrol digunakan *proxy* logaritma natural dari total penjualan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, terpilihlah 47 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (dari 100 perusahaan publik terbaik versi Majalah Investor, Mei 2009) dengan periode pengamatan antara tahun 2004 hingga 2008. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q.

Sibarani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, variabel independennya mekanisme *corporate governance* yang diprosikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit, sedangkan variabel interveningnya adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan; kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh baik terhadap manajemen laba maupun kinerja keuangan; dan komposisi dewan komisaris ndependen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi tidak terhadap kinerja keuangan.

Sekaredi (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan. Indikator mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional dengan Tobin's Q yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pasar dan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA) sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.

Bukhori (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan *CFROA*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Rini (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, 2009, 2010. Sampelnya berjumlah 171 perusahaan manufaktur. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan tingkat profitabilitas sedangkan variabel independennya adalah *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh pemegang saham institusi, komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PS (Pemegang saham institusi) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, KI (Komisaris independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, dan Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Pratiwi (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perbankan umum di Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate governance* yang diproksikan oleh Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional di Indonesia yang berjumlah 18 sampel bank umum. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan

bahwa hanya jumlah anggota dewan direksi yang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA), sedangkan variabel lainnya yaitu persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Klapper dan Love (2002)	<i>Corporate Governance</i> , <i>Return on Assets (ROA)</i> dan <i>Tobin's Q</i>	Adanya hubungan positif antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>return on assets (ROA)</i> dan <i>Tobin's Q</i>
2	Ana (2004)	Mekanisme <i>corporate governance</i> : mekanisme monitoring organisasi (rangkap kepemimpinan dewan direksi dan dewan komisaris, serta proporsi komisaris independen), mekanisme insentif manajemen (kompensasi manajemen), dan mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan institusional). Kinerja perusahaan diukur dengan <i>Economic Value Added</i> .	Terdapat hubungan antara mekanisme <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>Economic Value Added</i>
3	Pranata (2007)	<i>Good Corporate Governance</i> , <i>Return on Equity (ROE)</i> , <i>Tobin's Q</i> , dan <i>Net Profit Margin (NPM)</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap ROE, <i>Tobin's Q</i> , dan NPM.
4	Achchuthan dan Kajanathan (2012)	Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan <i>Return on Equity (ROE)</i> sedangkan	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap praktik <i>corporate governance</i> .

		variabel independennya adalah praktik <i>corporate governance</i> yang diproksikan oleh struktur kepemimpinan dewan, dewan komite, rapat direksi, dan proporsi komisaris independen.	
5	Hidayah (2007)	Variabel independen: <i>corporate governance</i> Variabel dependen: kinerja perusahaan Variabel <i>intervening</i> : pengungkapan informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>corporate governance</i> tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung.
6	Sam'ani (2008)	Variabel independennya adalah <i>corporate governance</i> yang diproksi oleh aktivitas komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, dan rasio leverage Variabel dependen: kinerja perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan <i>good corporate governance</i> dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.
7	Setiyarini dan Purwanti (2009)	Variabel dependen : kinerja perusahaan yang diukur dengan kinerja <i>Tobin's Q</i> . Variabel independen : Mekanisme <i>corporate governance</i> diukur dengan kepemilikan	Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit

		manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.	tidak berpengaruh.
8	Prayudhanto (2009)	<i>Corporate governance</i> (sebagai variabel independen), kinerja perusahaan (sebagai variabel dependen), dan ukuran perusahaan (sebagai variabel kontrol). Untuk variabel independen digunakan <i>proxy</i> : ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan <i>leverage</i> . Untuk variabel dependen digunakan <i>proxy</i> : ROA dan Tobin's Q. Sedangkan untuk variabel kontrol digunakan <i>proxy</i> logaritma natural dari total penjualan.	Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Secara umum, dengan masih terkonsentrasinya struktur kepemilikan perusahaan publik maka hanya mekanisme kontrol internal yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia.
9	Sibarani (2010)	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit Variabel intervening: manajemen laba.	Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan; kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh baik terhadap manajemen laba maupun kinerja keuangan; komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi tidak terhadap kinerja keuangan; manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
10	Sekaredi (2011)	Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> (dewan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan

		<p>komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional)</p> <p>Variabel dependen: Kinerja keuangan perusahaan (Tobin's Q untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pasar dan <i>Cash Flow Return On Asset (CFROA)</i> sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan)</p>	<p>terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan.</p>
11	Bukhori (2012)	<p>Variabel dependen: kinerja perusahaan diukur dengan <i>CFROA</i>.</p> <p>Variabel independen: ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme internal <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme internal <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>
12	Rini (2012)	<p>Variabel independen: pemegang saham institusi, komisaris independen, dan komite audit</p> <p>Variabel dependen: kinerja keuangan tingkat profitabilitas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PS (Pemegang saham institusi) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, KI (Komisaris independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.</p>
13	Pratiwi (2012)	<p>Variabel independen: <i>corporate governance</i> yang diprosikan oleh Komisaris</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota dewan direksi yang berpengaruh</p>

		Independen, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional Variabel dependen: kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA.	signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA), sedangkan variabel lainnya yaitu persentase Komisaris Independen, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).
--	--	--	---

Sumber: Berbagai Jurnal dan Skripsi

2.2 Kerangka Pemikiran

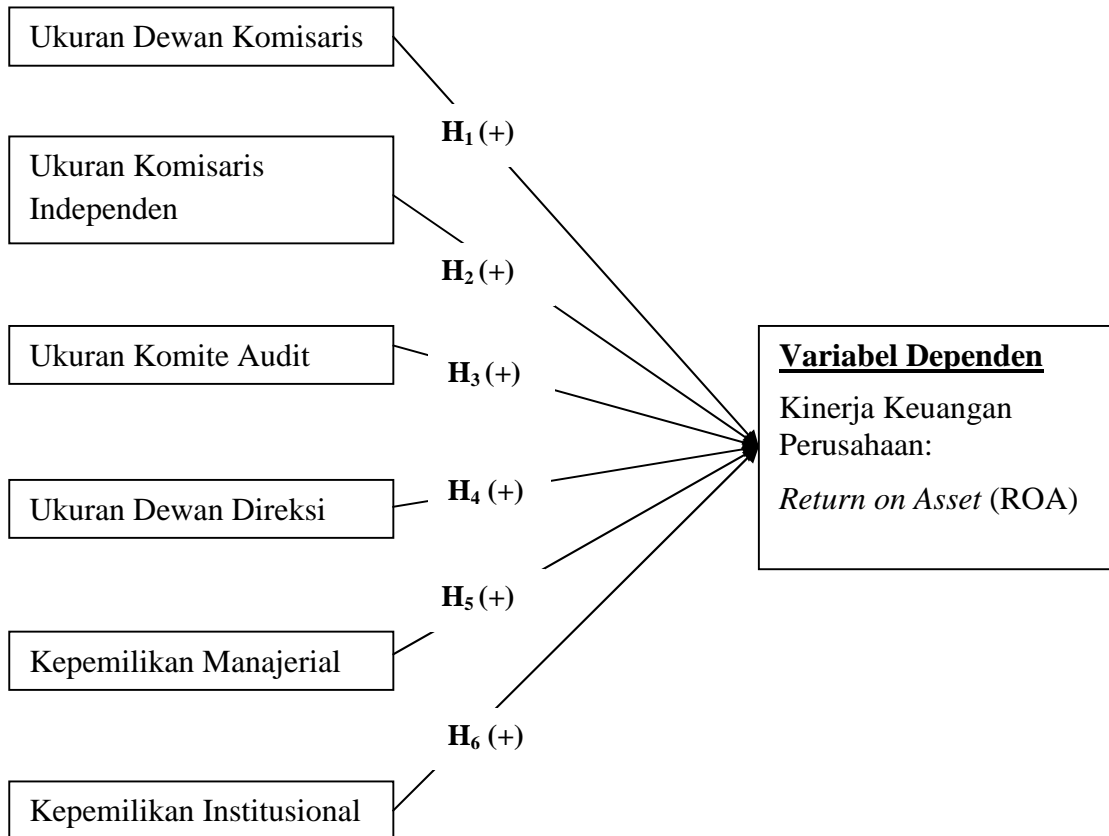
Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan 6 variabel independen yang merupakan mekanisme dari *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Mekanisme Corporate Governance:



2.3 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Terdapat enam hipotesis dalam penelitian ini yaitu: (i) Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (ii) Ukuran komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (iii) Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (iv) Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (v)

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan (vi) Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pembahasan terperinci mengenai rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Menurut Jensen, 1993 dalam Darwis, 2009, fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh komisaris diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Dari fungsi dewan tersebut, terlihat bahwa jumlah komisaris berpengaruh terhadap nilai/kinerja perusahaan (Laila 2011).

Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvisky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional

untuk mewakili pemegang saham. Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham perusahaan agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

Jaafar dan El-Shawa (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Sibarani (2010), yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan mampu menjaga kepentingan para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya untuk terakomodasi dengan baik, sehingga akan meminimalisir terjadinya *agency conflict* antara pemegang saham dengan dewan direksi. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Permasalahan agen dan prinsipal muncul karena perbedaan kepentingan keduanya sehingga dalam sebuah perusahaan diperlukan adanya pihak yang secara independen mengawasi kinerja manajemen agar tidak merugikan kepentingan pemegang saham. Komisaris Independen merupakan pihak yang dapat berperan sebagai pengawas manajemen dalam melaksanakan sistem *corporate governance*. Dalam perspektif keagenan kemampuan dewan komisaris dalam mekanisme pengawasan yang efektif tergantung pada independensinya terhadap manajemen (Beasley, 1996).

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer (Darwis, 2009 dalam Laila, 2011). Adanya komisaris independen yang

berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik. Aktivitas evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, potensi *mismanagement* yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimumkan. Berkurangnya *mismanagement* menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan akan tercapai. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa Perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yaitu Setiyarini dan Purwanti (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rini (2012) dan Choi, Park, and Yoo (2006 dalam Pratiwi, 2012), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.I.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya masalah agensi. Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik,

sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Menurut Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009) komite audit dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada disuatu perusahaan. Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan yaitu Sam'ani (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rini (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA.

Effendi (2005) menyimpulkan keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan

semakin efektif. Adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam mekanisme *corporate governance* yang baik. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan.

S. Beiner, *et al* (2003) dalam Purwaningtyas (2011) menegaskan bahwa dewan direksi dapat membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan publik. Beiner S., *et al* (2003) juga menegaskan bahwa dewan direksi merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan pemegang saham.

Di Indonesia pengaturan terhadap direksi terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjabarkan fungsi, wewenang,

dan tanggung jawab direksi. Ketentuan jumlah minimal dewan direksi yang disyaratkan dalam peraturan tersebut adalah 2 orang.

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik.

Hasil penelitian Sam'ani (2008) menunjukkan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Pratiwi (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu elemen *good corporate governance* (GCG) yang berpengaruh secara intensif bagi manajemen untuk melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham sebagai pemilik saham. Kepemilikan saham adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen yaitu direksi, manajer dan dewan komisaris yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan atau dengan kata lain manajer

tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial dapat menyatukan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Melalui kepemilikan saham manajerial, manajer diharapkan lebih bertindak untuk kepentingan pemegang saham setelah memiliki porsi saham tertentu di dalam perusahaan karena manajer memiliki resiko keuangan yang sama dengan *stakeholders* sehingga menuntut manajer memiliki kinerja lebih baik.

Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Dalam teori agensi disarankan adanya mekanisme insentif untuk mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholders*. Manajemen tidak akan berpikir seperti *stakeholders* apabila mereka tidak menjadi *stakeholder*. Adanya kepemilikan saham manajerial membuat kedudukan antara pemegang saham dan manajer dapat disejajarkan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Anggraini (2006) semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sekaredi, 2011). Mayoritas institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama

yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Menurut Purwaningtyas (2011), kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

Crutchley dan Hansen (1989), Bathala *et al.* (1994) dalam Faisal (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memonitor manajemen agar bertindak sesuai dengan harapan pemegang saham.

Pound (1988 dalam Pratiwi, 2012) mengeksplorasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dan menemukan bahwa adanya pengaruh positif kepemilikan saham institusional terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Sibarani (2010) dan Sekaredi (2011)

yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan,. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan, membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Secara umum dalam penelitian ini melibatkan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA (*Return on Assets*). ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total assets. ROA mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan.

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai variabel yang menunjukkan kinerja perusahaan karena ROA merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. *Return on Asset* (ROA) dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset yang ada dalam perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik karena akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk memperoleh nilai ROA dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{ROA} = \text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK} \div \text{TOTAL ASET}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan.

Pengukurannya adalah sebagai berikut:

Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

2. Ukuran Komisaris Independen

Ukuran komisaris independen diukur berdasarkan persentase komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris.

3. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran komite audit} = \text{Jumlah komite audit perusahaan}$$

4. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran dewan direksi} = \text{Jumlah dewan direksi perusahaan}$$

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham yang diterbitkan.

Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\% \text{ lembar saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham oleh institusi di dalam perusahaan. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\% \text{ lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dengan tujuan penelitian dan relatif dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten pada tahun 2010-2011
2. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah, karena jika menggunakan mata uang asing maka akan terjadi perbedaan penilaian kinerja keuangan yang disebabkan oleh perbedaan kurs saat ini dengan kurs pada tahun yang diteliti yaitu tahun 2010-2011.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam *annual report*, yaitu Dewan Komisaris,

Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional pada tahun 2010-2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan berupa laporan tahunan atau *annual report*. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2003). Laporan tahunan atau *annual report* diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2006). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum

menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik, sedangkan variabel non-metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan menggunakan teknik regresi berganda. Hal ini disebabkan karena penelitian ini terdapat lebih dari 1 variable independen dengan 1 variable dependen. Untuk dapat melakukan regresi ini, model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Syarat asumsi klasik tersebut agar menjadi model persamaan estimasi yang baik, yaitu:

1. Error menyebar normal atau data berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan memiliki suatu ragam (variance) tertentu yang diketahui melalui uji normalitas.
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas pada ragam error sehingga bersifat homoskedastis.
3. Tidak terjadi multikolinieritas antara variable bebas yang diketahui melalui uji multikolinier.
4. Error tidak mengalami autokorelasi (error tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal.

Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2006):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2006):

1. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

2. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima.

Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang regresi membentuk pola tertentu yang teratur. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat menggunakan Uji *Glejser*. Uji ini menggunakan nilai absolute dari residual dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2006) mengatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hamper sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas untuk *tolerance* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10

(Ghozali, 2006). Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan $t-1$ (sebelumnya). Jika ya, maka terdapat masalah autokorelasi yang muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Gejala ini menimbulkan konsekuensi yaitu interval keyakinan menjadi lebih lebar serta varians dan kesalahan standar akan ditafsir terlalu rendah. Data yang baik adalah terbebas dari autokorelasi (acak atau *random*). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson dan Runs test. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , H_5 dan H_6) menggunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ROA} = & \beta_0 + \beta_1 \text{DEKOM} + \beta_2 \text{KOMINDEP} + \beta_3 \text{KOMDIT} + \beta_4 \text{DEDIR} \\ & + \beta_5 \text{KEPMAN} + \beta_6 \text{KEPINS} + \varepsilon \end{aligned}$$

Dimana:

ROA = *Return on Assets*

DEKOM = Ukuran dewan komisaris

KOMINDEP = Ukuran komisaris independen

KOMDIT = Ukuran Komite Audit

DEDIR = Ukuran dewan direksi

KEPMAN = Kepemilikan Manajerial

KEPINS = Kepemilikan Institusional

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi

ε = error

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t).

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen (*goodness of fit*), yaitu dengan menghitung koefisien determinasi (R^2). Ghozali (2006) mengatakan Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Ghozali

(2006) mengatakan bahwa disarankan menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai *adjusted R²* dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif. Apabila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif, maka dianggap bernilai nol.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- i. Quick Look: Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- ii. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif (H_A) diterima.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Menurut Ghozali (2006) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- i. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- ii. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.